

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Risiko bisnis, bencana alam, perampokan, pencurian, serta kebangkrutan menjadi risiko yang sering terjadi pada banyak perusahaan, khususnya perbankan. Masih banyak perbankan yang tidak melakukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang kewajiban bank menerapkan manajemen risiko. Bank hanya fokus pada pengukuran *return*-nya saja tanpa memasukkan perhitungan risiko dalam pengambilan keputusan (Muhammad Muslich, 2007:4). Berdasarkan manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi. Maka perhitungan akan manajemen risiko dapat menjadi nilai tambah, karena potensi *return* yang diperoleh sudah diperhitungkan lebih besar daripada potensi risiko kerugiannya.

Secara garis besar, risiko yang dihadapi oleh perbankan terdiri dari tiga jenis risiko, yaitu risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Risiko kredit merupakan risiko yang paling besar di dunia perbankan. Risiko kredit dapat terjadi setelah diawali dengan risiko operasional. Namun risiko operasional sering diidentifikasi secara keliru sebagai risiko kredit, atau pun sebaliknya. Risiko kredit sendiri disebabkan oleh *default* debitur dan konsentrasi pinjaman sedangkan risiko operasional disebabkan oleh kesalahan analisa, pengikatan jaminan dan dokumentasi kredit. Maka dari

itu risiko operasional didefinisikan sebagai kerugian finansial yang disebabkan oleh lima hal, yaitu kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perusahaan, dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku (Muhammad Muslich, 2007:5). Terkadang risiko operasional inilah yang luput dari perhatian perbankan. Perbankan sering kali terlambat mengidentifikasi risiko operasional ini dan hal ini yang dapat membawa perbankan pada kebangkrutannya. Maka dari itu perbankan perlu menghitung tingkat risiko operasionalnya.

Dengan menghitung potensi kerugian maksimal risiko operasional, diharapkan aktivitas operasional tidak menimbulkan kerugian melebihi kemampuan bank itu sendiri. Adapun banyak pendekatan yang dapat dipakai untuk menghitung risiko operasional, diantaranya ERM (*Enterprise Risk Management*), RBS (*Risk Breakdown Structure*), ANP (*Analitic Network Process*), VaR (*Value at Risk*), dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan metode yang lain, metode yang lebih cocok untuk dunia perbankan adalah pendekatan VaR (Allen, 2004:3).

VaR adalah adalah alat statistik untuk mengukur besar risiko berdasarkan posisi saat ini. VaR merupakan pengukuran risiko secara kuantitatif yang mengestimasi potensi kerugian maksimal (*maximum potential loss*) yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang yang akan dihadapi pada jangka waktu tertentu (*holding period*) dan pada tingkat kepercayaan (*confidence level*) tertentu pada kondisi pasar yang normal. Metode selain VaR lebih sering dipakai di dunia

bisnis sektor manufaktur maupun sektor telekomunikasi. Sedangkan VaR lebih sering dipakai pada perusahaan penyedia jasa keuangan, salah satunya adalah bank.

Menurut Hasibuan (2009:1), bank sebagai lembaga intermediasi artinya bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank bagi hasil. Semua bank ini melakukan kegiatan penyaluran kredit. Kredit sendiri adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2008:96). Namun dari keempat jenis lembaga keuangan bank yang kegiatan utamanya pada penyaluran kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut UU No. 10 tahun 1998, BPR merupakan salah satu bank yang kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Kegiatan usaha yang diperkenankan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. BPR tidak

diperkenankan menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagai pedagang valuta asing, melakukan penyertaan modal dan kegiatan perasuransian serta melakukan kegiatan usaha selain yang telah diperkenankan.

Menurut Bank Indonesia (BI), jumlah BPR di Indonesia mengalami penurunan. BPR yang ada di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2010 sebanyak 1.706 unit. Pada tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 1.669 unit, tahun 2012 akhirnya jumlahnya kembali berkurang menjadi 1.653 unit, sedangkan pada bulan Juni 2013 menjadi 1.639 unit (okezone.com). Penurunan jumlah BPR disebabkan oleh BPR yang pailit, adanya merger yang dilakukan beberapa BPR, dan adanya akuisisi BPR oleh BJB. Total aset yang dimiliki BPR secara nasional mencapai Rp 147.716.149.522 pada Agustus 2013.

Sedangkan dari segi kemampuan BPR untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan dapat dilihat dari tingkat persentase NPL (*Non Performing Loan*). NPL adalah kredit yang kolektabilitasnya sudah dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank. Apabila NPL suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya, salah satunya biaya untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Vidyarto, 2012:149). PPAP sendiri mencerminkan risiko operasional bank. Maka semakin besar NPL, semakin besar pula risiko operasional yang ditanggung bank. Berikut

data NPL BPR konvensional Se-Bandung Raya periode 2009 hingga Agustus 2013.

**Tabel 1.1**  
**NPL (*Non Performing Loan*) BPR Konvensional Se-Bandung Raya**  
**Periode 2009- 2013**

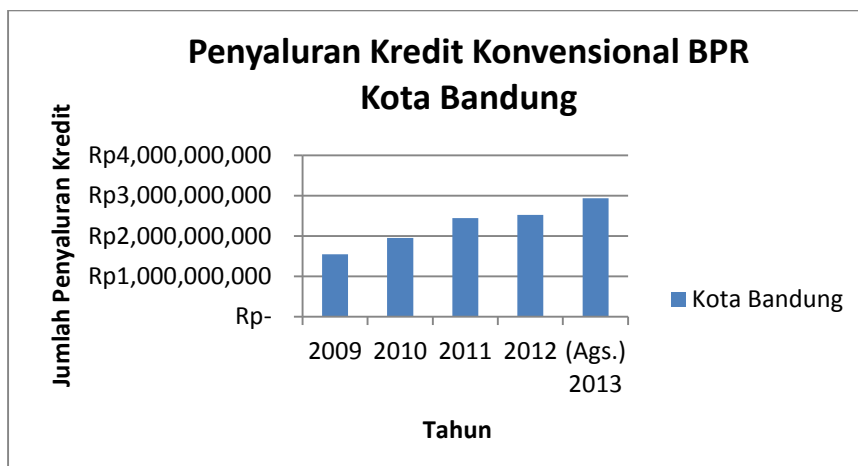
| <b>Tahun</b>          | <b>Kab. Bandung</b> | <b>Kab. Bandung Barat</b> | <b>Kota Bandung</b> | <b>Kota Cimahi</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>2009</b>           | 7,98%               | 5,90%                     | 10,42%              | 5,94%              |
| <b>2010</b>           | 7,66%               | 3,55%                     | 7,02%               | 5,07%              |
| <b>2011</b>           | 6,72%               | 3,39%                     | 7,54%               | 3,78%              |
| <b>2012</b>           | 5,65%               | 6,58%                     | 7,14%               | 4,37%              |
| <b>(Agustus) 2013</b> | 6,47%               | 6,75%                     | 6,97%               | 4,69%              |

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan data diatas, NPL Kota Bandung mengalami penurunan terus-menerus dari tahun 2011 sampai Agustus 2013. Sedangkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi mengalami ketidakstabilan NPL. Namun dibandingkan dengan ketiga daerah lainnya, NPL tahun 2009 sampai Agustus 2013 BPR konvensional Kota Bandung lebih besar untuk wilayah Se-Bandung Raya. Maka dari itu BPR konvensional di Kota Bandung yang akan dipilih sebagai studi kasus penelitian.

Menurut Erick (2013:2), semakin besar jumlah penyaluran kredit, maka tidak menutup kemungkinan semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh bank. Adapun risiko bank yang dimaksud, salah satunya adalah risiko operasional. Begitu pula yang ditunjukkan data di bawah ini, mengenai pertumbuhan penyaluran kredit BPR konvensional di kota Bandung periode 2009 sampai Agustus 2013 yang mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Maka secara tidak

langsung, risiko operasional pun akan mengalami kenaikan seiring kenaikan penyaluran kredit.



**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Kredit BPR Konvensional Berdasarkan Kolektibilitas di Kota Bandung**

Pada penelitian terdahulu, Sriwahyuni (2009) meneliti tentang analisis risiko kredit pegawai bermasalah pada PD. BPR Sukabumi cabang Kalapanunggal. Hasil penelitiannya yaitu jumlah kredit yang disalurkan dari tahun 2004-2007 terus meningkat dan perkembangan kredit pegawai bermasalah mengalami peningkatan sebesar 13,33 persen pada bulan Desember 2008 dan 17,94 persen pada bulan Maret 2009. Peningkatan kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya tenaga kerja untuk pembinaan dan pengawasan terhadap debitur, faktor eksternal debitur, dan faktor eksternal lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode VaR dapat diketahui bahwa kemungkinan kerugian maksimum kredit pegawai pada bulan April 2009 dengan tingkat keyakinan 95 persen adalah sebesar Rp 848.498.756 atau 22,97

persen dari total baki debit. Sedangkan dengan tingkat keyakinan 99 persen adalah sebesar Rp 1.198.183.092 atau 32,43 persen dari total baki debit.

Sedangkan Rahminta (2009), meneliti tentang analisis kredit di PD BPR BKK Pati Kota kantor Kas Margoyoso. Hasil penelitiannya yaitu kredit yang disalurkan PD BPR BKK Pati Kota Kantor Kas Margoyoso mengalami kredit bermasalah dengan nilai NPL 26,53 persen. Faktor penyebabnya adalah seksi pemasaran kredit yang kurang teliti, debitur dan monitoring kredit kurang insentif, serta keadaan ekonomi makro terutama fluktuasi. Kerugian maksimum yang dihadapi per Desember 2008 dengan tingkat keyakinan 95 persen sebesar Rp 329.271.901,56 atau 21,05 persen dari total baki debit, dan dengan tingkat keyakinan 99 persen sebesar Rp 464.971.836,74 atau 29,72 persen dari total baki debit.

Namun pendapat dari Navarret (2006), Napitupulu (2009), Dima (2009) , dan Xiaohua Fang (2010) menyatakan perhitungan risiko operasional berguna untuk meminimalisasi risiko-risiko perbankan. Dengan menghitung potensi kerugian maksimal risiko operasional, diharapkan aktivitas operasional tidak menimbulkan kerugian melebihi kemampuan bank. Perhitungan risiko operasional ini akan lebih informatif bagi bank dengan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memakai risiko operasional sebagai variabel dependennya. Jadi, tidak meneliti variabel dependen seperti dana pihak ketiga, suku bunga kredit, dan NPL yang biasa dipakai sebagai faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit oleh penelitian

terdahulu. Pada penelitian sebelumnya pun perhitungan risiko operasional yang diteliti diambil dari seluruh aktivitas perbankan. Disini peneliti membatasi penelitian hanya untuk aktivitas penyaluran kredit perbankan saja sehingga penelitian ini lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh risiko operasional bank dalam menyalurkan kreditnya. Dimana pengukuran risiko ini disesuaikan dengan karakteristik bank itu sendiri. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis mengangkat judul **”Pengaruh Tingkat Risiko Operasional dengan Pendekatan *Value at Risk* (VaR) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan”** (Studi pada PT. BPR Bina Maju Usaha).

## 1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan yang saya buat ini tepat sasaran, maka rumusan masalah dari uraian di atas adalah “Seberapa besar pengaruh tingkat risiko operasional terhadap penyaluran kredit perbankan?”

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai tingkat risiko operasional yang ada dalam perbankan dan penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).



### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat risiko operasional dari bank untuk dapat melakukan penyaluran kredit perbankan. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko operasional terhadap penyaluran kredit perbankan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

#### **1. Pengembangan Ilmu**

Memberikan wawasan dan pengetahuan, sehingga memberikan masukan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

#### **2. Penulis**

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang macam-macam risiko yang ada dalam menjalankan sebuah usaha, khususnya di bidang perbankan. Begitu pula cara mengukur risiko kerugian operasional yang mungkin diterima perbankan. Sehingga pihak bank tidak menanggung risiko yang melebihi kemampuannya, salah satunya risiko dalam penyaluran kredit.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Digunakan untuk menjadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian akan risiko operasional penyaluran kredit perbankan.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan bagi manajemen perbankan dan nasabah dalam penyusunan penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Manajemen Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan dan merencanakan prosedur penyaluran kredit sebagai upaya menangani risiko yang terjadi, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian penyaluran kredit.

##### 2. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan penyaluran kredit yang dilakukan bank beserta risiko dan manfaatnya.